



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TAPANULI SELATAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan perlu diadakan Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Tapanuli Selatan demi tercapainya efisiensi dan kualitas pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dipandang perlu diadakan Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Berbentuk Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

dan

Bupati Tapanuli Selatan

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **B A B I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kecamatan.....

6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan.
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
14. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
15. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau Pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada.
16. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah perubahan status desa digabung menjadi satu Kelurahan.
17. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa memberdayakan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
21. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah berbentuk Kelurahan.

## **B A B II**

### **PENGGABUNGAN DESA / KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

Desa dan Kelurahan yang ditata meliputi Nama Desa / Kelurahan Baru, perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Pembentukan Kelurahan dan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, serta Batas – Batas Desa sebagaimana tersebut pada Peraturan Daerah ini berasal dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

### Pasal 3

Persyaratan Perubahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK;
2. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dalam pembinaan masyarakat; dan
3. Tersedianya perangkat, sarana dan prasarana Pemerintahan.

### Pasal 4

Persyaratan Perubahan Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2000 jiwa atau 400 KK;
2. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dalam pembinaan masyarakat;
3. Sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungan dengan adat istiadat;
4. Potensi adalah tersedianya tempat untuk mencari mata pencaharian masyarakat perkotaan;
5. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, social, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
6. Letak yaitu mengenal komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan Desa dan pusat pengembangan wilayah; dan
7. Ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan social ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.

### Pasal 5

Dengan terbentuknya Peraturan Daerah ini jumlah Desa dari 493 Desa berubah menjadi 211 Desa, jumlah Kelurahan dari 10 berubah menjadi 37 Kelurahan.

## BAB III PENGABUNGAN DESA Bagian Pertama PENGABUNGAN DAN SEBUTAN DESA BARU Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini Perubahan Desa di Wilayah :

#### I. Kecamatan Aek Bilah :

1. Desa Tolang Gunung, Tolang Julu, Tolang Godang dan Tolang Dolok ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa Tolang dengan pusat pemerintahan Desa **Tolang**;
2. Desa Biru dan Desa Aek Jahengna ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Biru** dengan pusat pemerintahan Desa **Biru**;
3. Desa Sipagabu dan Desa Tapus Dolok ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Tapus Sipagabu** dengan pusat pemerintahan Desa **Tapus Sipagabu**;
4. Desa Sigolang dan Sipange ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sigolang** dengan pusat pemerintahan Desa **Sigolang**;
5. Desa Tapus Godang tetap menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Tapus Godang** dengan pusat pemerintahan Desa **Tapus Godang**;
6. Desa Huta Baru Tapus dan Tanjung Baru ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Huta Baru** dengan pusat pemerintahan Desa **Huta Baru**;
7. Desa Padang Panjang, Aek Horsik dan Aek Pisang ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Latong** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Latong**;

8. Desa Simatorkis .....



8. Desa Simatorkis, Purba Sinomba , Purba Tua, Panguripan dan Janji Mauli ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Urat** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Urat**;
9. Desa Gonting Pege, Huta Tonga Sihulambu dan Ramba Padang ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Huta Tonga** dengan pusat pemerintahan Desa **Huta Tonga**;
10. Desa Tapus Nabolak, Botung, Sihulambu, Pagaran Julu, Silangge dan Hapesong ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sihulambu** dengan pusat pemerintahan Desa **Sihulambu**;
11. Desa Hasahatan, Silangkitang, Sopo Onggang, Siborang dan Silayang-layang ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Silangkitang** dengan pusat pemerintahan Desa **Silangkitang**;
12. Desa Parsanggrahan, Huta Baru Lobu Tayas, Lampining, Lobu Tayas, Tanjung Selamat, Siranap dan Gariang ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Lobu Tayas** dengan pusat pemerintahan Desa **Lobu Tayas**;

## II. Kecamatan Arse :

1. Desa Bunga Bondar X, Batu Horpak Julu dan Batu Horpak Jae ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pinagar** dengan pusat pemerintahan Desa **Pinagar**;
2. Desa Gunung Manaon, Dolok Sinomba dan Napompar ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pardomuan** dengan pusat pemerintahan Desa **Pardomuan**;
3. Desa Arse Jae Dolok, Hanopan dan Pagaran Tulason ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Arse Hanopan** dengan pusat pemerintahan Desa **Arse Hanopan**;
4. Desa Huta Padang dan Aek Torop ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Nanggar Jati Huta Padang** dengan pusat pemerintahan Desa **Huta Padang**;
5. Desa Ujung Padang, Huta Tonga dan Bahap ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Nanggar Jati** dengan pusat pemerintahan Desa **Nanggar Jati**;
6. Desa Roncitan dan Siantar Tua ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Natambang Roncitan** dengan pusat pemerintahan Desa **Roncitan**;
7. Desa Sipogu tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sipogu** dengan pusat pemerintahan Desa **Sipogu**;
8. Desa Tano Ponggol, Nangguloan dan Aek Nabara ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Dalihan Natolu** dengan pusat pemerintahan Desa **Tano Ponggol**;

## III. Kecamatan Batang Angkola :

1. Desa Pasir dan Janji Matogu ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pasir** dengan pusat pemerintahan Desa **Pasir**;
2. Desa Basilam Baru tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Basilam Baru** dengan pusat pemerintahan Desa **Basilam Baru**;
3. Desa Sipangko tetap menjadi desa dengan sebutan Desa **Sipangko** dengan pusat pemerintahan Desa **Sipangko**;
4. Desa Huta Holbung tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Huta Holbung** dengan pusat pemerintahan Desa **Huta Holbung**;
5. Desa Muara Tais I tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Muara Tais I** dengan pusat pemerintahan Desa **Muara Tais I**;
6. Desa Muara Tais II tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Muara Tais II** dengan pusat pemerintahan Desa **Muara Tais II**;
7. Desa Muara Tais III tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Muara Tais III** dengan pusat pemerintahan Desa **Muara Tais III**;
8. Desa Janji Mauli MT tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Janji Mauli MT** dengan pusat pemerintahan Desa **Janji Mauli MT**;

9. Desa Tahalak dan Ujung Gading ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Tahalak Ujung dengan** pusat pemerintahan Desa **Tahalak**;
10. Desa Sidadi Julu tetap menjadi satu desa dengan sebutan desa **Sidadi I** dengan pusat pemerintahan Desa **Sidadi Julu**;
11. Desa Sidadi Hutaimbaru dan Sidadi Jae ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sidadi II** dengan Pusat pemerintahan Desa **Sidadi Hutaimbaru**;
12. Desa Janji Manaon tetap menjadi satu desa dengan sebutan desa **Janji Manaon** dengan Pusat pemerintahan Desa **Janji Manaon**;
13. Desa Sitampa dan Simatoras ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sitampa** dengan pusat pemerintahan Desa **Sitampa**;
14. Desa Pasar Lama tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pasar Lama** dengan pusat pemerintahan Desa **Pasar Lama**;
15. Desa Padang Togu, Benteng Huraba, Purba Tua PP ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Benteng Huraba** dengan Pusat pemerintahan Desa **Benteng Huraba**;
16. Desa Padang Kahombu tetap menjadi satu desa dengan sebutan desa **Padang Kahombu** dengan Pusat pemerintahan Desa **Padang Kahombu** .
17. Desa Sorik tetap menjadi satu desa dengan sebutan desa **Sorik** dengan Pusat pemerintahan Desa **Sorik**;
18. Desa Pargumbangan tetap menjadi satu desa dengan sebutan desa **Pargumbangan** dengan Pusat pemerintahan Desa **Pargumbangan**;
19. Desa Pangaribuan tetap menjadi satu desa dengan sebutan desa **Pangaribuan** dengan Pusat pemerintahan Desa **Pangaribuan**;
20. Desa Sorimadingin Lama, Sorimadingin Baru, Gunung Manaon ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sorimadingin** dengan Pusat pemerintahan Desa **Sorimadingin**;
21. Desa Muara Siagian, Pasir Nauli dan Purba Tua MT ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Muara Nauli** dengan Pusat pemerintahan Desa **Muara Nauli**;
22. Desa Bonan Dolok dan Simaninggir MT ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Tatengger** dengan Pusat pemerintahan Desa **Simaninggir MT**;
23. Desa Aek Nauli, tetap menjadi satu desa dengan sebutan desa **Aek Nauli** dengan Pusat pemerintahan Desa **Aek Nauli**;
24. Gunung Tua Panindoan dan Aek Lancat ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Gunung** dengan pusat pemerintahan Desa **Gunung Tua P**;
25. Desa Sibulele dan Muara Siregar ditata menjadi satu desa dengan sebutan desa **Sibulele** dengan pusat pemerintahan Desa **Sibulele**;
26. Desa Bargot Topong dan Tor Manyomba ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Bargot Topong** dengan pusat pemerintahan Desa **Bargot Topong**;
27. Desa Sigulang Losung tetap menjadi satu desa dengan sebutan desa **Sigulang Losung** dengan pusat pemerintahan Desa **Sigulang Losung**;
28. Desa Batu Raja, Hurase dan Huta Baru ditata menjadi satu desa dengan sebutan desa **Hurase** dengan Pusat pemerintahan Desa **Hurase**;
29. Desa Sori Madingin PP tetap menjadi satu desa dengan sebutan desa **Sori Madingin PP** dengan Pusat pemerintahan Desa **Sori Madingin PP**;
30. Desa Huta Padang ditata menjadi satu desa dengan sebutan desa **Huta Padang** dengan Pusat pemerintahan Desa **Huta Padang**;

#### **IV. Kecamatan Batang Toru :**

1. Desa Sitinjak dan Aek Ngadol ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Nauli** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Nauli**;
2. Desa Siagian dan Hutabaru ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Hutabaru** dengan Pusat pemerintahan Desa **Hutabaru**;

3. Desa Sialang .....

3. Desa Sialang, Siloung dan Parinduan ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sisipa** dengan pusat pemerintahan Desa **Sisipa**;
4. Desa Perkebunan Sigala-gala tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa Perkebunan **Sigala-gala** dengan pusat pemerintahan Desa **Sigala-gala**;
5. Desa Perkebunan Hapesong tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Perkebunan Hapesong** dengan pusat pemerintahan Desa **Perkebunan Hapesong**;
6. Desa Garoga tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Garoga** dengan pusat pemerintahan Desa **Garoga**;
7. Desa Batu Horing tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Batu Horing** dengan pusat pemerintahan Desa **Batu Horing**;
8. Desa Batu Hula tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Batu Hula** dengan pusat pemerintahan Desa **Batu Hula**;
9. Desa Sumuran tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sumuran** dengan pusat pemerintahan Desa **Sumuran**;
10. Desa Napa tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa dengan pusat pemerintahan Desa **Napa** ;
11. Desa Hapesong Lama tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Hapesong Lama** dengan pusat pemerintahan Desa **Hapesong Lama**;
12. Desa Sianggunan tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sianggunan** dengan pusat pemerintahan Desa **Sianggunan**;
13. Desa Hutagodang tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Hutagodang** dengan pusat pemerintahan Desa **Hutagodang**;
14. Desa Wek IV tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Wek IV** dengan pusat pemerintahan Desa Wek IV;
15. Desa Telo tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Telo** dengan pusat pemerintahan Desa **Telo**;
16. Desa Wek III tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Wek III** dengan pusat pemerintahan Desa Wek III;
17. Desa Hapesong Baru tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Hapesong Baru** dengan pusat pemerintahan Desa Hapesong Baru;
18. Desa Sipenggeng tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa Sipenggeng dengan pusat pemerintahan Desa Sipenggeng;

#### V. Kecamatan Muara Batang Toru :

1. Desa Bandar Hapinis tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Bandar Hapinis** dengan pusat pemerintahan Desa **Bandar Hapinis**;
2. Desa Simarlelan dengan pusat pemerintahan Desa Simarlelan;
3. Desa Muara Huta Raja dengan pusat pemerintahan Desa **Mabang**;
4. Desa Pardamean tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pardamean** dengan pusat pemerintahan Desa Pardamean;
5. Desa Tarapung Raya tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Tarapung Raya** dengan pusat pemerintahan Desa **Terapung Raya**;
6. Desa Muara Opu tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Muara Opu** dengan pusat pemerintahan Desa Muara Opu;

#### VI. Kecamatan Marancar :

1. Desa Huta Padang, Huraba dan Pangarongan ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Huraba** dengan pusat pemerintahan Desa **Huraba**;
2. Desa Sigordang, Aek Bustak, Gapuk Julu dan Gunung Tua ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Gapuk Tua** dengan pusat pemerintahan Desa **Gapuk Julu**;
3. Desa Mombang Boru, Gunung Manaon, Binanga dan Perkebunan Marancar ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Mombang Boru** dengan pusat pemerintahan Desa **Mombang Boru**;

4. Desa Simaninggir .....



4. Desa Simaninggir, Aek Pasir dan Pancur Batu ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Simaninggir** dengan pusat pemerintahan Desa **Simaninggir**;
5. Desa Marancar Julu, Najumambe, Pasar Marancar dan Sugi Jae ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Marancar** dengan pusat pemerintahan Desa **Pasar Marancar**;
6. Desa Sugi Tonga dan Sugi Julu ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sugi** dengan pusat pemerintahan Desa **Sugi Tonga**;
7. Desa Siranap, Aek Sabaon Jae dan Aek Sabaon Julu ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Sabaon** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Sabaon Julu**;
8. Desa Haunatas tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Haunatas** dengan pusat pemerintahan Desa **Haunatas**;
9. Desa Bonan Dolok dan Tanjung Rompa ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Tanjung Dolok** dengan pusat pemerintahan Desa **Tanjung Rompa**;
10. Desa Janji Manaon dan Aek Nabara ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Nabara** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Nabara**;
11. Desa Marancar Godang tetap menjadi Desa **Marancar Godang** dengan pusat pemerintahan Desa **Marancar Godang**.

#### **VII. Kecamatan Angkola Barat :**

1. Desa Perkebunan Malombu dan Perkebunan Sangkumur ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Perkebunan** dengan pusat pemerintahan Desa **Perkebunan Sangkumur**;
2. Desa Sisundung tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sisundung** dengan pusat pemerintahan Desa **Sisundung**;
3. Desa Sigumuru tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sigumuru** dengan pusat pemerintahan Desa **Sigumuru**;
4. Desa Tindoan Laut tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Tindoan Laut** dengan pusat pemerintahan Desa **Tindoan Laut**;
5. Desa Lobu Layan Sigordang tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Lobu Layan Sigordang** dengan pusat pemerintahan Desa **Lobu Layan Sigordang**;
6. Desa Aek Pardomuan tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Pardomuan** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Pardomuan**;
7. Desa Lembah Lubuk Raya tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Lembah Lubuk Raya** dengan pusat pemerintahan Desa **Lembah Lubuk Raya**;
8. Desa Bandar Tarutung tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Bandar Tarutung** dengan pusat pemerintahan Desa **Bandar Tarutung**;
9. Desa Simataniari tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Simataniari** dengan pusat pemerintahan Desa **Simataniari**;
10. Desa Aek Nabara tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Nabara** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Nabara**;
11. Desa Sitaratoit tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sitaratoit** dengan pusat pemerintahan Desa **Sitaratoit**;
12. Desa Sialogo tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sialogo** dengan pusat pemerintahan Desa **Sialogo**;
13. Desa Simatohir tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Simatohir** dengan pusat pemerintahan Desa **Simatohir**;
14. Desa Sibangkua tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sibangkua** dengan pusat pemerintahan Desa **Sibangkua**;
15. Desa Panobasan tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Panobasan** dengan pusat pemerintahan Desa **Panobasan**;
16. Desa Siuhom tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Siuhom** dengan pusat pemerintahan Desa **Siuhom**;
17. Desa Parsalakan tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Parsalakan** dengan pusat pemerintahan Desa **Parsalakan**;



18. Desa Batu Godang tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Batu Godang** dengan pusat pemerintahan Desa **Batu Godang**;
19. Desa Panobasan Lombang tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Panobasan Lombang** dengan pusat pemerintahan Desa **Panobasan Lombang**;

#### **VIII. Kecamatan Angkola Timur :**

1. Desa Pargarutan Julu tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pargarutan Julu** dengan pusat pemerintahan Desa **Pargarutan Julu**;
2. Desa Pargarutan Tonga tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pargarutan Tonga** dengan pusat pemerintahan Desa **Pargarutan Tonga**;
3. Desa Panompuan Jae tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Panompuan Jae** dengan pusat pemerintahan Desa **Panompuan Jae**;
4. Desa Panompuan Tonga dan Panompuan Julu ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Panompuan** dengan pusat pemerintahan Desa **Panompuan Tonga**;
5. Desa Kantin, Tapus, Sitorbis, Pagaran RI dan Huta Baru ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pargarutan Dolok** dengan pusat pemerintahan Desa **Tapus**;
6. Desa Pintu Langit Julu, Huraba dan Sibio-bio ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Huraba** dengan pusat pemerintahan Desa **Huraba**;
7. Desa Huta Ginjang dan Pargumbangan ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Huta Ginjang** dengan pusat pemerintahan Desa **Huta Ginjang**;
8. Desa Sijungkang dan Sihail-kail ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sijungkang** dengan pusat pemerintahan Desa **Sijungkang**;
9. Desa Silinggom-Linggom, Binanga dan Sitada-tada ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sanggapati** dengan pusat pemerintahan Desa **Binanga**;
10. Desa Marisi, Dusun 'Garonggang, Dusun Hasobe dan Dusun Asrama Brimob ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Marisi**;
11. Desa Pasir Ampolu, Sirumbi, Dusun Kapuran, Simandalu, Siregar Matogu dan Dusun Torgodang ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pall XI** dengan pusat pemerintahan Desa **Siregar Matogu**;
12. Desa Gunung Tua Pargarutan, Pargarutan Jae dan Sampean Kapar ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pargarutan Jae** dengan pusat pemerintahan Desa **Gunung Tua Pargarutan**;
13. Desa Lantosa Rogas tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Lantos Rogas**;

#### **IX. Kecamatan Saipar Dolok Hole :**

1. Desa Sidapdap, Simanosor Julu dan Simanosor Jae ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sidapdap Simanosor** dengan pusat pemerintahan Desa **Sidapdap**;
2. Desa Simanosor Tapus, Simanosor Gareja, Simanosor Tonga, Saut Matogu dan Banua Rakyat ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Saut Banua Simanosor** dengan pusat pemerintahan Desa **Simanosor Tapus**;
3. Desa Simangambat Godang, Pagaran Panindoan dan Huta Rakyat ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Simangambat Godang** dengan pusat pemerintahan Desa **Simangambat Godang**;
4. Desa Galanggang, Damparan, Haunatas dan Lumban Hariara ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Damparan Haunatas** dengan pusat pemerintahan Desa **Damparan**;
5. Desa Somba Debata, Binanga dan Lenggahara ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Somba Debata Purba** dengan pusat pemerintahan Desa **Somba Debata**;
6. Desa Bangun Purba, Pijorkoling, Padang Mandailing Godang, Padang Mandailing Julu dan Padang Garugur ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Padang Mandailing Garugur** dengan pusat pemerintahan Desa **Padang Mandailing Godang**;

7. Desa Simole-ole, Situnggaling dan Ulu Mamis ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Ulu Mamis Situnggaling** dengan pusat pemerintahan Desa **Situnggaling**;
8. Desa Huta Nopan, Sidaboar, Purba Sinomba Mandalasena, Parkayuan, Batu Tua, Parau Sorat, Baringin Tua, Sitabo-tabo dan Pinarik Baru ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Parau Sorat Sitabo- tabo** dengan pusat pemerintahan, Desa **Hutanopan**;
9. Desa Mandalasena, Pargumbangan, Janji Mauli Mandalasena, Huta Baru Mandalasena, Hutanopan, Gunung Selamat, Rahuning Julu, Tano Hudon Jae, Tano Hudon Julu dan Pintu Padang ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pintu Padang Mandalasena** dengan pusat pemerintahan Desa **Janji Mauli Mandalasena**;
10. Desa Sigiring-Giring, Sunge Pining, Huta Tonga Turunan dan Turunan ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sunge Sigiring-giring** dengan pusat pemerintahan Desa **Sigiring-giring**;
11. Desa Batu Hombang, Tambiski, Silaiya Jae, Silaiya Julu, Sayur Matua dan Silangkitang Lombang ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Silangkitang Tambiski** dengan pusat pemerintahan Desa **Batu Hombang**;
12. Desa Parsuluman dan Batang Garut ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Batang Parsuluman** dengan pusat pemerintahan Desa **Batang Garut**;

#### X. Kecamatan Sayur Matinggi.

1. Desa Sialang tetap menjadi satu dengan sebutan Desa **Sialang** dengan pusat pemerintahan Desa **Sialang**;
2. Desa Sipange Julu tetap menjadi satu desa dengan sebutan **Desa Sipange Julu** dengan pusat pemerintahan Desa **Sipange Julu**;
3. Desa Sipange Godang tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sipange Godang** dengan pusat pemerintahan Desa **Sipange Godang**;
4. Desa Mondang tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Mondang** dengan pusat pemerintahan Desa **Mondang**;
5. Desa Tolang Julu tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Tolang Julu** dengan pusat pemerintahan Desa **Tolang Julu**;
6. Desa Lobu Sipange dan Siunjam ditata menjadi satu desa dengan sebutan **Sipange Siunjam** dengan pusat pemerintahan Desa **Sipange Siunjam**;
7. Desa Bange tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Bange** dengan pusat pemerintahan Desa **Bange**;
8. Desa Bulu Gading tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Bulu Gading** dengan pusat pemerintahan Desa **Bulu Gading**;
9. Desa Silaiya Julu dan Silaiya Jae ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Silaiya** dengan pusat pemerintahan Desa **Silaiya**;
10. Desa Aek Libung tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Libung** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Libung**;
11. Desa Aek Badak Jae tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Badak Jae** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Badak Jae**;
12. Desa Aek Badak Julu dan Gunung Tinggi ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Badak Julu** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Badak Julu**;
13. Desa Huta Pardomuan tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Huta Pardomuan** dengan pusat pemerintahan Desa **Huta Pardomuan**;
14. Desa Parmonangan dan Somanggal II ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Somanggal Parmonangan** dengan pusat pemerintahan Desa **Somanggal Parmonangan**;
15. Desa Aek Talakma, Sihaborgoan, Arse Hutabaru ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Lumban Huayan** dengan pusat pemerintahan Desa **Sihaborgoan**;
16. Desa Aek Uncim tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Uncim** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Uncim**;

17. Desa Panindooan tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Panindooan** dengan pusat pemerintahan Desa **Panindooan**;
18. Desa Aek Kahombu tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Kahombu** dengan pusat pemerintahan Desa Aek Kahombu;
19. Desa Batu Horpak tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Batu Horpak** dengan pusat pemerintahan Desa **Batu Horpak**;
20. Desa Aek Sulum, Gunung Tua Baringin, Baringin TT, Janji Mauli TT ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Situmba** dengan pusat pemerintahan Desa **Gunung Tua Baringin**;
21. Desa Purbatua TT, Lumban Sihubil ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Purba Tua** dengan pusat pemerintahan Desa **Purba Tua**;
22. Desa Lumban Jabi-Jabi tetap menjadi satu desa dengan sebutan desa **Lumban Jabi-Jabi** dengan pusat pemerintahan Desa **Lumban Jabi-Jabi**;
23. Desa Ingul Jae tetap menjadi satu desa dengan sebutan desa **Ingul Jae** dengan pusat pemerintahan Desa **Ingul Jae**;
24. Desa Sisoma tetap menjadi satu desa dengan sebutan desa **Sisoma** dengan pusat pemerintahan Desa **Sisoma**;
25. Desa Lumban Ratus tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Lumban Ratus** dengan pusat pemerintahan Desa **Lumban Ratus**;
26. Desa Kota Tua tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Kota Tua** dengan pusat pemerintahan Desa **Kota Tua**;
27. Desa Simaninggir TT tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Simaninggir TT** dengan pusat pemerintahan Desa **Simaninggir TT**;
28. Desa Huta Raja tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Huta Raja** dengan pusat pemerintahan Desa **Huta Raja**;
29. Desa Harean tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Harean** dengan pusat pemerintahan Desa **Harean**;
30. Desa Janji Mauli Baringin tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Janji Mauli Baringin** dengan pusat pemerintahan Desa **Janji Mauli Baringin**;
31. Desa Tanjung Leuk dan Aek Silaiya tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Silaiya Tanjung Leuk** dengan pusat pemerintahan Desa **Silaiya Tanjung Leuk**;
32. Desa Aek Parupuk tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Parupuk** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Parupuk**;
33. Desa Tanjung Medan tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Tanjung Medan** dengan pusat pemerintahan Desa dengan **Tanjung Medan**;
34. Desa Tolang Jae, Simpang Tolang dan Aek Raja ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Tolang Jae** dengan pusat pemerintahan Desa **Tolang Jae**;

#### **XI. Kecamatan Angkola Selatan.**

1. Desa Sihuik-huik tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sihuik-huik** dengan pusat pemerintahan Desa **Sihuik-Sihuik**;
2. Desa Situmbaga tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Situmbaga** dengan pusat pemerintahan Desa **Situmbaga**;
3. Desa Sinyior tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sinyior** dengan pusat pemerintahan Desa **Sinyior**;
4. Desa Pintu Padang tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pintu Padang** dengan pusat pemerintahan Desa **Pintu Padang**;
5. Desa Sibong-bong tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sibong-bong** dengan pusat pemerintahan Desa **Sibong-bong**;
6. Desa Siamporik Dolok tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Siamporik Dolok** dengan pusat pemerintahan Desa **Siamporik Dolok**;
7. Desa Siamporik Lombang tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Siamporik Lombang** dengan pusat pemerintahan Desa **Siamporik Lombang**;

8. Desa Sihopur .....

8. Desa Sihopur tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sihopur** dengan pusat pemerintahan Desa **Sihopur**;
9. Desa Aek Natas tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Aek Natas** dengan pusat pemerintahan Desa **Aek Natas**;
10. Desa Dolok Godang tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Dolok Godang** dengan pusat pemerintahan Desa **Dolok Godang**;
11. Desa Malombu tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Malombu** dengan pusat pemerintahan Desa **Malombu**;
12. Desa Tandihat tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Tandihat** dengan pusat pemerintahan Desa **Tandihat**;
13. Desa Perkebunan Marpinggan tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Perkebunan Marpinggan** dengan pusat pemerintahan Desa **Perkebunan Marpinggan**;
14. Desa Gunung Baringin tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Gunung Baringin** dengan pusat pemerintahan Desa **Gunung Baringin**.

## **XII. Kecamatan Sipirok.**

1. Desa Hasahatan Dolok, Janji Lobi dan Liang ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Dolok Sordang Julu** dengan pusat pemerintahan Desa **Janji Lobi**;
2. Desa Pangaribuan, Sialang dan Gadu ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Pangaribuan** dengan pusat pemerintahan Desa **Pangaribuan**;
3. Desa Salese, Panaungan dan Sihaborgoan ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Panaungan** dengan pusat pemerintahan Desa **Salese**;
4. Desa Paringgonan, Aek Horsik, Hasahatan Situmba dan Mandurana ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Situmba Julu** dengan pusat pemerintahan Desa **Paringgonan**;
5. Desa Gunung Tua Baringin, Aek Tampang, Pinang Sori dan Sidangkal ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Situmba** dengan pusat pemerintahan Desa **Gunung Tua Baringin**;
6. Desa Sialagundi dan Muara Siregar ditata menjadi satu Desa dengan sebutan, Desa **Sialagundi** dengan pusat pemerintahan Desa **Sialagundi**;
7. Desa Dano Situmba, Ri Nabolak dan Saba Siala ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Kilang Papan** dengan pusat pemerintahan Desa **Sabasiaia**;
8. Desa Janji Mauli tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Janji Mauli** dengan pusat pemerintahan Desa **Janji Mauli**;
9. Desa Tolang tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Tolang** dengan pusat pemerintahan Desa **Tolang**;
10. Desa Batang Miha Jae dan Batang Miha Julu ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Saba Batang Miha** dengan pusat pemerintahan Desa **Batang Miha Jae**;
11. Desa Sialaman Julu, Gunung Tinggi Sialaman, Labuhan Rasoki dan Sihulambu ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sialaman** dengan pusat pemerintahan Desa **Sialaman Julu** ;
12. Desa Parsorminan, Langsar, Paran Dolok Dan Huta Baru ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Paran Dolok Mardomu** dengan pusat pemerintahan Desa **Parsorminan**;
13. Desa Saba Tolang, Kampung Satia, Sidangar-dangar, Garoga, ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Sarogodung** dengan pusat pemerintahan Desa **Saba Tolang**;
14. Desa Hasang Marsada dan Pangkal Dolok S ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Hasang Marsada** dengan pusat pemerintahan Desa **Hasang Marsada**;
15. Desa Tanjung Sunge dan Nagasaribu ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Batang Tura Julu** dengan pusat pemerintahan Desa **Tanjung Sunge**;
16. Desa Jambur Batu dan Sabatarutung ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Batang Tura** dengan pusat pemerintahan Desa **Jambur Batu**;



17. Desa Sabungan, Tapus dan Ampolu ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Dolok Sordang** dengan pusat pemerintahan Desa **Tapus**;
18. Desa Silangge, Sigiring-giring Dolok, Sigiring-giring Lombang, Tanjung Medan dan Tanjung Tua ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Pahae Aek Sagala** dengan pusat pemerintahan Desa **Silangge**;
19. Desa Anturmangan, Purba Tua, Padang Bulan, Aek Latong, Huraba, dan Purba Sinombatua ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Marsada** dengan pusat pemerintahan Desa **Purba Tua**;
20. Desa Paran Julu tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Paran Julu** dengan pusat pemerintahan Desa **Paran Julu**;
21. Desa Bulu Mario dan Sitandieng ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Bulu Mario** dengan pusat pemerintahan Desa **Bulu Mario**;
22. Desa Batu Satail tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Batu Satail** dengan pusat pemerintahan Desa **Batu Satail**;
23. Desa Bulu Payung, Pengkolan, Gunung Sari dan Hutaimbaru ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Luat Lombang** dengan pusat pemerintahan Desa **Bulu Payung**;
24. Desa Paske, Dano Lombang dan Gunung Hasahatan ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Aek Batang Paya** dengan pusat pemerintahan Desa **Dano Lombang**;
25. Desa Sampean, Poldung Lombang dan Poldung Dolok ditata menjadi satu Desa dengan sebutan Desa **Sampean** dengan pusat pemerintahan Desa **Sampean**;
26. Desa Ramba Sihasur tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Ramba Sihasur** dengan pusat pemerintahan Desa **Ramba Sihasur**;
27. Desa Barnang Koling tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Barnang Koling** dengan pusat pemerintahan Desa **Barnang Koling**;
28. Desa Pargarutan tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pargarutan** dengan pusat pemerintahan Desa **Pargarutan**;
29. Desa Simaninggir tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Simaninggir** dengan pusat pemerintahan Desa **Simaninggir**;
30. Desa Sibadoar tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Sibadoar** dengan pusat pemerintahan Desa **Sibadoar**;
31. Desa Paran Padang tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Paran Padang** dengan pusat pemerintahan Desa **Paran Padang**;
32. Desa Padang Bujur tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Padang Bujur** dengan pusat pemerintahan Desa **Padang Bujur**;
33. Desa Bagas Lombang tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Bagas Lombang** dengan pusat pemerintahan Desa **Bagas Lombang**;
34. Desa Pangurabaan tetap menjadi satu desa dengan sebutan Desa **Pangurabaan** dengan pusat pemerintahan Desa **Pangurabaan**.

#### **BAB IV**

#### **PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **PERUBAHAN STATUS DESA DAN NAMA KELURAHAN**

#### **Pasal 7**

Dengan Peraturan Daerah ini Desa ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan di Wilayah :

#### **I. Kecamatan Arse :**

1. Desa Jonggol Jae, Jonggol Julu, Arse Julu, Lumban Lobu, Pagaran Pisang dan Gunung Tua Arse ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Arse** dengan pusat pemerintahan **Arse**;
2. Desa Pagaran Siala, Lancat Julu, Gunung Tinggi Lancat, Lancat Tonga dan Lancat Jae ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Lancat** dengan pusat pemerintahan **Lancat**.

II. Kecamatan .....



## **II. Kecamatan Batang Angkola :**

1. Huta Tonga MT dan Paran Padang ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Huta Tonga** dengan pusat pemerintahan **Huta Tonga MT**;
2. Desa Bintuju ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Bintuju** dengan pusat pemerintahan **Bintuju**;
3. Kelurahan Sigalangan tetap menjadi Kelurahan **Sigalangan** dengan pusat pemerintahan **Sigalangan**;
4. Desa Pintu Padang I dan Pintu Padang IV ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Pintu Padang Raya I** dengan pusat pemerintahan **Pintu Padang I**;
5. Desa Pintu Padang II dan Pintu Padang III ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Pintu Padang Raya II** dengan pusat pemerintahan **Pintu Padang III**;
6. Desa Sijungkit Dolok, Sijungkit Lombang dan Purba Tua Sigalangan dan Siture ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Sijungkit** dengan pusat pemerintahan **Sijungkit**;

## **III. Kecamatan Batang Toru.**

1. Desa Perkebunan Batang Toru dan Perkebunan Aek Pahu ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Perkebunan Batang Toru** dengan pusat pemerintahan **Perkebunan Batang Toru**;
2. Desa Aek Pining ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Aek Pining** dengan pusat pemerintahan **Aek Pining**;
3. Kelurahan Wek I ditata menjadi kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Wek I** dengan pusat pemerintahan **Wek I**;
4. Kelurahan Wek II ditata menjadi kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Wek II** dengan pusat pemerintahan **Wek II**;
5. Desa Padang Lancat dan Sisoma Jae ditata menjadi kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Padang Lancat** dengan pusat pemerintahan **Padang Lancat**.

## **IV. Kecamatan Marancar.**

1. Desa Pasar Sempurna, Gapuk Jae dan Aek Toras ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Pasar Sempurna** dengan pusat pemerintahan **Pasar Sempurna**.

## **V. Kecamatan Angkola Barat.**

1. Kelurahan Sitingjak ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Sitingjak** dengan pusat pemerintahan **Sitingjak**;
2. Desa Simatorkis Sisoma ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Simatorkis Sisoma** dengan pusat pemerintahan **Simatorkis Sisoma**;
3. Desa Sangkunur ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Sangkunur** dengan pusat pemerintahan **Sangkunur**;
4. Desa Rianiate ditata menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Rianiate** dengan pusat pemerintahan **Rianiate**;

## **VI. Kecamatan Angkola Timur.**

1. Desa Panggulangan, Sosopan Pargarutan, Gunung Manaon, Pargarutan Batu dan Pargarutan Baru ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Pasar Pargarutan** dengan pusat pemerintahan **Panggulangan**;
2. Desa Sirumambe, Galanggang, Tiang Aras, Dusun Siringo-ringo, Tabusira dan Gunung Manungkap ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Batang Tura Sirumambe** dengan pusat pemerintahan **Tabusira**.

## **VII. Kecamatan Saipar Dolok Hole.**

1. Desa Pasar Sipagimbar, Sipagimbar Godang, Sibatang Kayu, Sigordang Dolok, Berastagi dan Sigordang Lombang ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Pasar Sipagimbar** dengan pusat pemerintahan **Pasar Sipagimbar**;
2. Desa Purba Tua Simangambat, Gunung Tua Pandapotan, Simandera Huta Julu dan Sigoring-goring dan Kelurahan Pasar Simangambat ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan **Aek Simotung** dengan pusat pemerintahan **Pasar Simangambat**.

### **VIII. Kecamatan Sayur Matinggi.**

1. Desa Sayur Matinggi I, Sayur Matinggi II, Sayur Matinggi III, Sayur Matinggi IV dan Aek Garugur ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Sayur Matinggi** dengan pusat pemerintahan **Sayur Matinggi**;
2. Desa Panabari, Huta Tonga TT dan Padang Bujur ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Panabari Huta Tonga** dengan pusat pemerintahan **Panabari**.

### **IX. Kecamatan Angkola Selatan.**

1. Desa Napa ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Napa** dengan pusat pemerintahan **Napa**;
2. Desa Simarpinggán ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Simarpinggán** dengan pusat pemerintahan **Simarpinggán**;
3. Desa Tapian Nauli ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Tapian Nauli** dengan pusat pemerintahan **Tapian Nauli**;
4. Desa Pardomuan ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Pardomuan** dengan pusat pemerintahan **Pardomuan**;

### **X. Kecamatan Sipirok.**

1. Desa Parau Sorat, Padang Matinggi, Pagaran Batu, Pangkal Dolok P dan Panggulan ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan **Parau Sorat** dengan pusat pemerintahan **Parau Sorat**;
2. Kelurahan Pasar Sipirok tetap menjadi Kelurahan **Pasar Sipirok** dengan pusat pemerintahan **Pasar Sipirok**;
3. Kelurahan Hutasuhut, Desa Hutasuhut II, Hutasuhut III dan Hutasuhut IV ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dan masuk ke Wilayah Kelurahan **Hutasuhut** dengan pusat pemerintahan **Hutasuhut**;
4. Kelurahan Bagas Nagodang, Desa Bagas Nagodang II, Bagas Nagodang III, Bagas Nagodang IV dan Banjar Toba ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan **Sipirok Godang** dengan pusat pemerintahan **Bagas Nagodang**;
5. Kelurahan Baringin, Desa Huta Raja dan Sumuran ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan **Baringin** dengan pusat pemerintahan **Baringin**;
6. Kelurahan Bunga Bondar tetap menjadi Kelurahan **Bunga Bondar** dengan pusat pemerintahan **Bunga Bondar**;

### **XI. Kecamatan Muara Batang Toru.**

1. Desa Rianiate I ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Muara Manompas** dengan pusat pemerintahan **Muara Manompas**;
2. Desa Rianiate II ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan **Muara Ampolu** dengan pusat pemerintahan **Muara Manompas**;
3. Desa Huta raja ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan **Hutaraja** dengan sebutan Kelurahan **Huta Raja** dengan pusat pemerintahan **Huta Raja**.

## **BAB V**

### **PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6, maka diadakan lebih dulu pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Sebelum terlaksananya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat Caretaker Kepala Desa oleh Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 7, diangkat seorang Kepala Kelurahan di Kelurahan dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dengan dirubahnya status Desa menjadi Kelurahan tersebut pada Pasal 3, maka sistim Pemerintahan Desa berubah menjadi sistim Pemerintahan Kelurahan.

### **Pasal 10**

Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilantik oleh Kepala Daerah pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan Kelurahan.

### **Pasal 11**

Untuk membantu tugas Kepala Kelurahan dalam memimpin jalannya Pemerintahan di Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dibantu oleh Perangkat Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

Pembiayaan yang diperlukan akibat Penggabungan Desa, Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan pada APBD.

#### **Pasal 13**

Sebelum adanya sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kepala Daerah mempersiapkan kebutuhan yang dianggap perlu yang akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah dan atau Pejabat yang diunjuk.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Nomor 017/PR/2007 tentang Penataan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian melalui Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 25 Agustus 2008

**BUPATI TAPANULI SELATAN,**

**d t o**

**ONGKU P. HASIBUAN**

Diundangkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 26 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

  
**AFFAN SIREGAR**